

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adams, H.C., *The Science of Finance*, New York, 1898,
- Adi, Rianto., *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi kedua, Granit, Jakarta, 2005.
- Ali, Achmad., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta:Kencana, 2012).
- ., *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ghalia, 2002),
- ., *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung Tbk. 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan Kedua).
- Ashshofa, Burhan., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Badriyah, Siti Malikhatun., *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Bastable, C.F., *Public Finance*, edisi ketiga (London, 1993),
- Bird, Richard M., dan Milka Casanegra de Jantscher, *Improving Tax Administration in Developing Countries*, (International Monetary Fund, 1992).
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston London: Allyn and Bacon, Inc., 1982).
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- Buhori, H., *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press, 1993).
- Cooper, Graeme S, *Tax avoidance and The Rule of Law*, (Netherlands:IBFD, 1997).
- Crumbley, D. Larry., Jack P. Friedman, dan Susan B. Anders, *Dictionary of Tax Terms*, (New York: Barron's Business Guide, 1994)
- Darmodiharjo, Darji., dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995).

- Darmodihardjo, Darji., dalam Rhiti, Hyronimus., *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, (Jogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011),
- Devas, Nick, *et al.*, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1989).
- Djafar Saidi, Muhammad, Eka Merdekawati Djafar, 2011; *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2011
- Erwin,Muhamad., *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*,(Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- ., *Filsafat Hukum*, Cetakan ke-4, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2015)
- Friedmann,W., *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theory)*, Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,1993).
- Friedmann, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Prespective*, (New York: Russel Foundation, 1975)
- Friedrich, Carl Joachim., *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Fuady, Munir.,*Aliran Hukum Kritis, Paradigma KetidakberdayaanHukum*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2003),
- Fuller, Lon Luvois., *The Morality of Law*, (London: Yale University Press, 1969)
- Handoko, Rukiah., *Pengantar Hukum Pajak: Buku A*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).
- Hiariej, Eddy OS., *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009),
- Ibrahim, Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing,2007).
- Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Empat, 2001).
- Ismail, Nurhasan., *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, (Jogyakarta: Kerjasama Huma dan Magister Hukum UGM, 2007)
- Jacobstein, J. Myron., dan Roy M. Mersky, *Fundamentals of Legal Research*, (New York: The Foundation Press, ed.IV, 1973).

- Kelsen, Hans., *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, di terjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2007).
- Kotler, Philip., dan Keller L. Kevin, *Metodologi Penelitian:Aplikasi Dalam Pemasaran*, Indeks, Jakarta, 2006
- Lang, Michael (editor)., *Tax Treaty Interpretation*, (Belanda: Linde Verlag Wien, 2001).
- Leemans, A.F., *The Management of Change in Government*, (The Hague, Institute of Social Studies, 1976).
- Lombantoruan, Sophar., *Ensiklopedi Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1990)
-----, *Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Grasindo, Edisi Revisi, 1996).
- Manan, Bagir., *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2004)
- Marsyahrul, Tony., *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Grasindo, 2005),
- Mansury, R., *Kebijakan Fiskal*, (Tangerang: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 1999)
-----, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1996)
-----, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan*, (Jakarta: STIA LAN, 1992).
- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, Edisi Revisi 2011)
- Mertokusumo, Sudikno., dan A.Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
-----, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)
-----, dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)
- Miller, Angharad & Lynne Oats, *Principles of International Taxation*, 2006, Tottel Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2008)
-----, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, 2014)
- Manullang, E.Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007)
-----, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana,2007)

- ., *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007),
- M. Wantu, Fence., *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Nakayama, Kiyoshi., *Designing And Drafting A Domestic Law To Implement A Tax Treaty*, (International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department Tax Policy, Maret 2011).
- Noer, Deliar., *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, (Bandung: Pustaka Mizan, 1997).
- Nurmantu, Safri., *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, Edisi Ketiga, 2005).
- Otto, Jan Michiel., “*Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*”, (Leiden, Universitas Groningen, 2002).
- Pohan, Chairil Anwar., *Pedoman Lengkap Pajak Internasional, Ed.Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Popper, Karl R., *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy)*, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Prasetyo, Teguh., & Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Ctk. Keempat, 2011).
- Purbacaraka, Purnadi., *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, Cet. I, 1986),
- ., dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan IV, 1993)
- ., *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, Cet. I, 1986),
- Rahardjo, Satjipto., *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007)
- ., *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006).
- ., *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991).
- Rato, Dominikus., *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

- Rawls, John., *A Theory of Justice*,(London: Oxford University Press,1973) yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006).
- Rasyidi, Lilik.dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Rhiti, Hyronimus., *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, (Jogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).
- Ritonga, A.Anshari., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka El Manar, 2017).
- Robbins, Stephen P., (1994), *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi* (Penerjemah: Jusuf Udaya), Jakarta: Penerbit Arcan, 1994)
- Saidi, Muhamamad Djafar., & Eka Merdekawati Djafar., *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Salim Hs, H., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)
- Salman S, H.R Otje., *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010).
- Sampara, Said., *et al, Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011).
- Saunders, Cheryl dan Katherine L Roy (Eds.), *The Rule of Law*, Sydney: The Federation Press, 2003.
- Seligman, Edwin R.A., *Essays on Taxation*, edisi 10 (New York, 1925),
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Shadani, Djazoli., *Tax Management: Legalitas dan Implikasinya terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak, Seminar Perpajakan*, (Jakarta: 1 Juni 1997),
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama,2006)
- Sidharta, Bernard Arief., *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: FH Unika Parahyangan, 2010)
- Sihombing, Jonker., *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, (Jakarta: Ref Publisher, 2013),
- Singarimbun, Masri., dan Sofyan effendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 2004).
- Smith, Adam., *An Inquiry into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*, (Indianapolis: Liberty Classics, 1981).

- Soekanto, Soerjono., dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993).
- , dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, dikutip Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, ctk. kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soemitro, Rochmat., *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Bandung: PT Eresco, 1988).
- , *Asas-asas Hukum Perpajakan*, (Bandung: Binacipta, 1991).
- , dan Sugiharti, Dewi Kania., *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004)
- , “*Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pajak Pendapatan* ”, (Jakarta-Bandung: PT Eresco, Cetakan. Ke.9, 1979),
- Soeprapto, Maria Farida Indrati., *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010)
- Sommerfeld, Ray.M., Hershel M Anderson, and Horace R.Brock., *An Introduction to Taxation*, (New York: Harcout Brace Jovanovic.Inc, 1983),
- Spitz, Barry., *International Tax Planning*, 2nd Edition, (London: Butterworth, 1983).
- Suandy, Erly., *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, 2005).
- Suparnyo, *Hukum Pajak : Suatu Sketsa Asas*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012),
- Syahrani, Riduan., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra AdityaBakti, 1999)
- Tyler, Tom R., *"Why people obey the law"* (Yale University Press, 1990).
- Urinov, V, *Developing Country Perspectives on Automatic Exchange of Tax Information. Law, Social Justice & Global Development*, 1-28, 2015.
- Vlies, Van de, *Handboek Wetgeving*, (Zwolle: Tjeenk Willink, 1987)
- Vogel, Klaus *et al*, *Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN, and US Model Convention for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital. With Particular Reference to German Treaty Practice, Third Edition*, The Hague: Kluwer Law International, 1991.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

Weeghel, Stef Van., *The Improper Use of Tax Treaties*, (Den Haag: *Kluwer Law International*, 1998).

Westberg, Bjorn., *Cross-Border Taxation of E-Commerce*, (Netherlands: IBFD Publications BV, 2002).

Wiersma, William., *Research Methods In Education: An Introduction*, (Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc, 1986).

Yani, Ahmad., & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. ketiga, (Jakarta: Raja Gafindo, 2003),

Yudkin, Leon., *Tax Technique Handbook: A Legal Structure for Effective Income Tax Administration*, (Cambridge Harvard law School, 1971).

Zain, Mohammad., *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, Edisi Kedua, 2004)

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).

Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016),

B. Peraturan dan Perundang-undangan

1. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ditetapkan Tanggal 02 November 2020.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Ditetapkan Tanggal 23 Agustus 2017.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Ditetapkan Tanggal 01 Juli 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ditetapkan Tanggal 22 Oktober 2010.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ditetapkan Tanggal 25 Maret 2009.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. . Ditetapkan Tanggal 23 September 2008.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Ditetapkan 30 April 2008.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*. Ditetapkan Tanggal 16 Agustus 2007.

Undang-Undang No 25 / 2007 *tentang Penanaman Modal*. Ditetapkan Tanggal 26 April 2007.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 *Tentang Pengadilan Pajak*. Ditetapkan Tanggal 12 April 2002.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Ditetapkan Tanggal 10 November 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 *Tentang Pasar Modal*. Ditetapkan Tanggal 10 November 1995.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *tentang Perbankan*. Ditetapkan Tanggal 25 Maret 1992.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Ditetapkan Tanggal 31 Desember 1983.

2. Peraturan Presiden (Perpres):

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 *tentang Satu Data Indonesia*. Ditetapkan Tanggal 12 Juni 2019.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 *Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 *Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*. Ditetapkan Tanggal 20 Juli 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 *tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Ditetapkan 29 Desember 2011

3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK):

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.03/2020 *tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona*. Ditetapkan 21 Maret 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.03/2018 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi*

Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Ditetapkan Tanggal 19 Februari 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 *Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.* Ditetapkan Tanggal 03 Maret 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2016 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016 Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui **Special Purpose Vehicle**.* Ditetapkan Tanggal 23 September 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.010/2016 *Tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui **Special Purpose Vehicle**.* Ditetapkan Tanggal 23 Agustus 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 Tahun 2015 *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (**Exchange of Information**).* Ditetapkan Tanggal 07 Juli 2015.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 *Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.* Ditetapkan Tanggal 22 Desember 2000.

4. Peraturan Direktorat Jendral Pajak :

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-25/Pj/2010 *Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-62/Pj./2009 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.* Ditetapkan Tanggal 20 April 2010

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 *tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.* Ditetapkan Tanggal 30 April 2010.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 *tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.* Ditetapkan Tanggal 30 April 2010.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 *tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.* Ditetapkan Tanggal 5 November 2009

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 03/PJ.03/2008 *Tentang Penentuan Status Beneficial Owner Sebagaimana Dimaksud Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Mitra*. Ditetapkan Tanggal 22 Agustus 2008. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 03/PJ.03/2008 juga telah mencabut SE - 04/PJ.34/2005.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 04/PJ.34/2005 *Tentang Petunjuk Penetapan Kriteria "Beneficial Owner" Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya*. Ditetapkan 07 Juni 2005.

4. Peraturan Lainnya Terkait :

Pengumuman Nomor Peng-65/Pj/2020 Tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan Dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis (*Automatic Exchange Of Financial Account Information*). Ditetapkan Tanggal 20 Mei 2020.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) di tahun 2019 yakni Nomor 15 *tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi*. Ditetapkan Tanggal 21 Juni 2019.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019 *Tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi*. Ditetapkan Tanggal 23 September 2019.

Permenkum HAM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Ditetapkan Tanggal 05 Mei 2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 *Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan*. Ditetapkan Tanggal 15 Agustus 2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.04/2017 *tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka*. Ditetapkan Tanggal 14 Maret 2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 *Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan*. Ditetapkan Tanggal 16 Maret 2017.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Ditetapkan Tanggal 03 Agustus 2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 *Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Ditetapkan 28 Desember 2016.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 13 Tahun 2017 *tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal*. Ditetapkan Tanggal 11 Desember 2017

C. Jurnal/Majalah/Website:

Abdullah, Maryati., *Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufalse Ekonomi*, (Jakarta:CNNIndonesia, 21/06/2016).

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufalse-konomi>.

Diakses Tanggal 20 Desember 2019.

Aksi Perizinan dan Tata Niaga, khususnya sub-aksi Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Keuangan, dan Perkebunan. Aksi pencegahan korupsi 2019-2020 selengkapnya dapat dilihat melalui link berikut:

<https://stranaspk.kpk.go.id/id/fokus-aksi/perijinan-tata-niaga>

APBN (Anggaran Belanja dan Penerimaan Negara) 2018-Kemenkeu.

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>. Diakses Tanggal 29 Desember 2019.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross,

<https://www.virtuescience.com/nicomachean-ethics.html>.

Diakses pada tanggal 10 Februari 2020.

Assem Chawla dan Surabhi Singhi, “*Exchange of Information: The Jargon of the Day*,” *International Taxation* 4 (February 2011)

Attamimi, A. Hamid S., “*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*”, (Jakarta: Universitas Indonesia, Disertasi Doktor, 1990).

Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM), *Ease of Doing Business* di Indonesia Terus Membaik, (Diakses 30 Mei 2020, Pkl 02.33 WIB).

<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ease-of-doing-business-di-indonesia-terus-membaik>

Badaruddin, Kiagus Ahmad., *Sambutan Kepala PPATK Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.*, (Jakarta, 27 Maret 2018).

Baker, Philip., *Beneficial Ownership: After Indofood*, (VI GITC Review, 2007).

- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Economy Profile of Indonesia, Doing Business 2020 Indicators* (Diakses 20 Januari 2021, Pkl 09.01 WIB).
<https://www.investindonesia.go.id/id/why-invest/ease-of-doing-business/www.doingbusiness.org>
- Brown, C., *Beneficial Ownership and The Income Tax Act*, (Ottawa: Canadian Tax Journal, 2003)
- Bruno Gangemi, *International Mutual Assistance through Exchange of Information: General Report for International Fiscal Association*, Cashier de Droit Fiscal International/International Fiscal Association, (1990).
- Cahyadi, Hepi., *Beneficial Owner di Era Disrupsi Digital*, (Jakarta: DJP, 2019).
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/beneficial-owner-di-era-disrupsi-digital>.
 Diakses Tanggal 20 Desember 2019.
- Danon, R., *OECD - Clarification of the Meaning of "Beneficial Owner" in the OECD Model Tax Convention – Comment on the April 2011 Discussion Draft*, (OECD: Bulletin for International Taxation, 2011 (Volume 65), No 8, 05 Juli 2011). https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Journal-Articles/Bulletin-for-InternationalTaxation/collections/bit/html/bit_2011_08_o2_1.html.
 Diakses tanggal 30 Januari 2019.
- Data BPS, BI, dan DJP, (2014).
- Darussalam, *Beneficial Owner dalam Konteks Perpres No. 13/2018 dan Pajak*, (Jakarta: DDTC, 2018). https://news.ddtc.co.id/beneficial-owner-dalam-konteks-perpres-no-13-2018-dan-pajak-12661?page_y=0
- dan Danny Septriadi (3), *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule* yang dikutip Paulus Merks, “*Categorizing International Tax Planning*”, *Fundamentalist of International Tax Planning*, IBFD, 2007
- (2), “*Tax Planning, Aggressive Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion dan Anti Tax avoidance*”, (Jakarta: Inside Tax: Edisi Perkenalan, September 2007),
- Darussalam, John Hutagaol & Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*, (Jakarta : Danny Darussalam Tax Center, 2010).
- David B, J., Oliver, Jerome B. Libin, Stef van Weeghel dan Charl du Toit, *Beneficial Ownership*, (*Bulletin For International Bureau of fiscal Documentation*, IBFD, Juli 2000).
- Deborah, “*The Legal Relevance of the OECD Standard*” dalam *Exchange of Information for Tax Purposes*, ed. Oliver- Christoph Günther dan Nicole Tüchler (Vienna: Linde Verlag, 2013)

- Duane R., Monette, Thomas J Sullivan, & Corucl R. Dejong., *Applied Social Research*, (New York, Chicago, San Francisco: Holt, Rinehart and Winston Inc, 1986).
- Du Toit, charl P, *Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties* (Amsterdam, IBFD publication, 1999).
- Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 14 Desember 2017
- EITI Indonesia, *Perpres Beneficial Ownership, Langkah Maju untuk Transparansi Industri Ekstraktif*, (19 Januari 2020). <https://eiti.ekon.go.id/perpres-beneficial-ownership-langkah-maju-untuk-transparansi-industri-ekstraktif/> Diakses Tanggal 19 Januari 2020.
- European Parliament Policy Department A, Overview of Legislation Practices Regarding Exchange of Information between National Tax Administration in Tax Matters (European Union: October 2015).*
- Faiz, Pan Mohamad., *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009).
- Febby, Cindy Kikhonia., *Teknologi Blockchain untuk Transparansi Registrasi Beneficial Owner*, (Jakarta: DDTC Consulting, 08 Mei 2020).
- Financial Action Task Force, ‘*International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*’ (2016).
<http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf>. Diakses 20 Oktober 2019.
- Financial Action Task Force, ‘*FATF Guidance Transparency and Beneficial Ownership*’, (2014).
<<http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf>>. Diakses 20 Oktober 2019.
- Gie, Kwik Kian., *Automatic Exchange of Information (AEOI) The End Of Tax Evasion ?*, (Jakarta: Seminar Nasional pada Kwik Kian Gie School of Business, 2016).
<http://kwikkiangie.com/v1/2016/09/automatic-exchange-of-information-aeoi-the-end-of-tax-evasion-key-note>
- Global Finance Integrity, *Illicit Financial Flows from Developing Countries 2004-2014* (2015).
- Gunawan, Edy., *Keadilan Bagi Wajib Pajak Yang Patuh Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*, (Jakarta: Law Review Volume XIX, No. 2 – November 2019)

- Hariman, Satria., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam.*, (Kendari: Jurnal Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 2, Juni 2016), hal. 288-300
- Jain, Saurabh., *Effectiveness of the Beneficial Ownership Test in Conduit Company Cases*, (Amsterdam: IBFD Publication, 2013).
- Jimenez, Adolfo Martin *Beneficial Owner: Current Trends*, dalam *World Tax Journal*, IBFD, Februari 2010.
- ., *Beneficial Ownership: Current Trends (Part II)*, Tax India International, 2011).
- Jong, Julia de., Alexander Meyer dan Jeffrey Owens. “*Using blockchain for transparent beneficial ownership registers*,” *International Tax Review*, June 2017.
www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/i/taxlaw/institute/WU_Global_Tax_Policy_Center/Tax_Technology/feat_blockchain_beneficial_ownership_COMPLETED.pdf.
- Jurdant, Fianna., “*Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Indonesia: Legislative and Regulatory Policy Options for Sustainable Capital Markets*”. (OECD Corporate Governance Working Papers No. 9, 2013).
<http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k43m4pdrj36-en.pdf?expires=1521619894&id=id&accname=guest&checksum=EFB79BC230212C5BBF06A911CE-A9B6CE>. Diakses 26 Desember 2019.
- Kantor Staf Presiden (KSP): *Isu Beneficial Ownerships, Berbagi Pengalaman dengan Negara Progresif di Pertemuan Tahunan WB IMF 2018*. Diakses Tanggal 31 Mei 2020.
<http://ksp.go.id/isu-beneficial-ownerships-berbagi-pengalaman-dengan-negara-progresif-di-pertemuan-tahunan-wb-imf-2018/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), *Indonesia Dukung OECD Selesaikan Rumusan Perpajakan Internasional Ekonomi Digital*, (Kemenkeu: 25 Februari 2020)
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-dukung-oecd-selesaikan-rumusan-perpajakan-internasional-ekonomi-digital/>
Diakses Tanggal 02 Januari 2021
- Kementerian Keuangan RI, APBN KITA, Edisi Desember 2020.
Website: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/informasi-apbn-kita-2020/>
Diakses Tanggal 20 Januari 2021.
- Kemenkeu-APBN (Anggaran Belanja dan Penerimaan Negara) 2018
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>. Diakses Tanggal 29 Desember 2019.

- Kenzie, Baker Mc., *'Indonesian Tax Authorities Finally Entered an Automatic Exchange of Information Agreement with Hong Kong'* (18 Juni, 2017) <<https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2017/06/indonesian-tax-authorities-finally-entered/>> Diakses 20 Oktober 2019.
- Ketut, Supasti Dharmawan Ni., *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya pascasarjana Universitas Udayana, 2006).
- KlikLegal.com, *Konferensi Global, Sejumlah Lembaga Pertegas Transparansi Beneficial Ownership adalah Isu Sangat Strategis*, (24 October 2017). <https://kliklegal.com/konferensi-global-sejumlah-lembaga-pertegas-transparansi-beneficial-ownership-adalah-isu-sangat-strategis/>. Diakses Tanggal 30 Januari 2019.
- Kofler dan Tumpel, *"Tax Information Exchange Agreements,"* dalam *Internationale Amtshilfe in Steuersachen*, ed. Lang, Schuch, dan Staringer (Vienna: Linde Verlag, 2011),
- Kontan.co.id., *Menambah penerimaan negara via AEOI*, (kontan.co.id, 19 April 2018). <https://analisis.kontan.co.id/news/menambah-penerimaan-negara-via-aeoi?page=all> Diakses Tanggal 25 Desember 2019.
- Kontan.co.id., *Rating Naik, Indonesia bias lebih leluasa tukar informasi beneficial ownership*, (Kontan.co.id, 19 Juni 2018). <https://nasional.kontan.co.id/news/rating-naik-indonesia-bisa-lebih-leluasa-tukar-informasi-beneficial-ownership>. Diakses 29 Desember 2019
- Kurniawan., *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, (Mataram: Jurnal Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 1, Februari 2014), Hal. 70-83.
- Liputan6.com., *Penerimaan Pajak 2019 Hanya Capai 84,4 Persen dari Target*, (07 Januari 2020). <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya-capai-844-persen-daritarget>. Diakses: Tanggal 30 Mei 2020.
- Luthan, Salman., *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum Vol. 16, No. 1, Januari 2009
- Mahkamah Agung RI, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 75/B/PK/PJK/2017 Tertanggal 13 Februari 2017* <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2dec38361ab4193b649785cf9c668f52> Diakses Tanggal 31 Januari 2020.
- , *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1648/B/PK/PJK/2017 Tertanggal 20 Oktober 2017* <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2dec38361ab4193b649785cf9c668f52> Diakses Tanggal 31 Januari 2020.

- Majdanska, Alicja., Clement Migai dan Marta Olowka., *High-Net-Worth Individuals: The Challenge for Tax Administrations, Financial Intelligence Units and Law Enforcement Agencies.*, (Buletin for International Taxation October 2018, OECD)
- Martini, Maira., dan Maggie Murphy, *Just for Show? Reviewing G20 Promises on Beneficial Ownership*, (2015).
<https://transparency.eu/wp-content/uploads/2016/11/TI_G20-Beneficial-Ownership-Promises_2015.pdf> Diakses 20 Oktober 2019.
- Merks, Paulus., “*Categorizing International Tax Planning*”, *Fundamentalist of International Tax Planning*, IBFD, 2007
- Meyer, S.P. *The Meaning of Beneficial Ownership and The Use Thereof For tax Treaty Shopping and Tax Avoidance*, Pretoria, Greek: University of Pretoria, 2010.
- Mayer, Pollyana., “*Information Exchange: Deterring International Tax Avoidance and Evasion.*” *Tax Notes International* (26 Juni 2007)
- Mukarromah, Awwaliatul., *RI dan Hong Kong Tandatangani Perjanjian Bilateral AEOI*, (2017) https://news.ddtc.co.id/pertukaran-informasi-pajak-ri-dan-hong-kong-tandatangani-perjanjian-bilateral-aeoi-10297?page_y=900 . Diakses Tanggal 20 Desember 2019.
- Nilasari, *Gerakan Sajak (Sadar Pajak): Upaya Peningkatan Kesadaran Pajak bagi Generasi Milenial*, (30 Juli 2018). <https://www.pajak.go.id/artikel/gerakan-sajak-sadar-pajak-upaya-peningkatan-kesadaran-pajak-bagi-generasi-milenial>. Diakses Tanggal 28 Desember 2019.
- Nelson, Rebecca M., “*Analyst in International Trade and Finance.*” *The G-20 and International Economic Cooperation: Background and Implications for Congress* (Agustus 2010).
- OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development), ‘*Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Listed Companies in Asia*’ (2016) <https://www.oecd.org/daf/ca/Disclosure-Beneficial-Ownership.pdf>. Diakses 20 Oktober 2019.
- ,
‘*Automatic Exchange of Information*’. <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>. Diakses 20 Oktober 2019.
- Oetomo, Hendarto, Olina Rizki Arizal, Ngakan Putu Ardana (undated), *Tax Treaty is Easy Mudah Memahami P3B*, (Jakarta: PPM Manajemen, ISBN 979-442-410-2)

- Oguttu, Annet Wanyana., “*A Critique on Effectiveness of Exchange of Information on Tax Matters in Preventing Tax Avoidance*,” Bulletin for International Taxation, (January 2014)
- ONE, *Trillion Dollar Scandal*, (03 September 2014).
<https://www.one.org/international/policy/trillion-dollar-scandal/>.
 Diakses Tanggal 20 Desember 2019.
- Oguttu, Annet Wanyana., “*A Critique on Effectiveness of Exchange of Information on Tax Matters in Preventing Tax Avoidance*,” Bulletin for International Taxation, (January 2014)
- Pajak.go.id., <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>. Diakses 29 Desember 2019.
- Pope, Jeff., *The Compliance Costs of Taxation in Australia and Tax Simplification: The Issues*, (Australian Journal of Management, The University of New South Wales, 1993).
- Portal.ahu.go.id, *Dirjen AHU : Indonesia Harus Menjadi Tempat yang Mudah untuk Berinvestasi*, (Jakarta: 25 Oktober 2019). <http://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2374-dirjen-ahu-indonesia-harus-menjadi-tempat-yang-mudah-untuk-berinvestasi>. Diakses Tanggal 25 Desember 2019.
- Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, ‘*Beneficial Owner Dalam OECD Model Tax Convention (MTC): Sejarah Dan Perkembangan Terkini*, ’ (2012)
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/beneficial_ownership_-_aplikasi_dalam_tax_treaty.pdf. Diakses 20 Oktober 2019.
- Publish What You Pay Indonesia, ‘*Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, dan EITI*’ (25 November 2016).
<https://pwypindonesia.org/id/transparansi-beneficial-ownership-penerimaan-negara-dan-eiti/>. Diakses 26 Desember 2019.
- PWYP Indonesia, *Siaran Pers: Global Conference on Beneficial Ownership Transparency*, (06 November 2017).
<https://pwypindonesia.org/id/siaran-pers-global-conference-on-beneficial-ownership-transparency/>. Diakses Tanggal 20 Desember 2019
- , *Perpres Penerapan Prinsip Mengenal “Beneficial Ownership” Momentum Percepatan Pemberantasan Korupsi*, (13 Maret 2018).
<https://pwypindonesia.org/id/perpres-penerapan-prinsip-mengenal-beneficial-ownership-momentum-percepatan-pemberantasan-korupsi/>.
 Diakses Tanggal 30 Januari 2019.
- Respationo, HM.Soerya., “*Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum*”, Jurnal Hukum Yustisia, No.86 Th.XXII Mei-Agustus 2013, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta).

- Restorative justice Consortium 2006*, (Jakarta: Varia Peradilan, Tahun XXVII, No. 323, Oktober 2012),
- Schlemenson, Aldo., *Organizational Structure and Human Resources in Tax Administration*, (International Monetary Fund, 1992).
- Schwab, Klaus Martin., *The Fourth Industrial Revolution* (New York: World Economic Forum, 2017)
- Shadani, Djazoli., *Tax Management: Legalitas dan Implikasinya terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak, Seminar Perpajakan*, (Jakarta: 1 Juni 1997)
- Slamet, Indrayagus., “*Tax Planning, Tax Avoidance dan Tax Evasion di Mata Perpajakan Indonesia*”, *Inside Tax* Edisi September 2007.
- Slemrod, Joel., dan Shlomo Yitzhaki, “*Tax Avoidance, Evasion and Administration*”, *Handbook of Public Economics*, Vol. 3 (2002),
- Sjahdeini, Sutan Remy., *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).
- Susanto, Herry., *Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak , (DJP)*
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>. Diakses: Tanggal 30 Mei 2020
- Tempo.co.id, *Ditjen Pajak Tanggapi Laporan OECD soal Pertukaran Data Otomatis*, (Jakarta: Tempo.com, 10 Juni 2019).
<https://bisnis.tempo.co/read/1213233/ditjen-pajak-tanggapi-laporan-oecd-soalpertukaran-data-otomatis/full&view=ok> Diakses 2 Januari 2020
- Thuronyi, Victor., *Tax Law Design and Drafting Volume 2*, (Washington DC: International Monetary Fund, 1998).
- Tobing, Ganda Christian., dan Yusuf W. Ngantung., *Beneficial Ownership Case, Inside Tax*, Edisi 14, Maret 2013.
- United States Permanent Sub-Committee on Investigations, “*Tax Haven Abuses: The Enablers, The Tools and Secrecy*”, (2006).
- Vanistendael, Frans., dalam buku Graeme S. Cooper, *Tax avoidance and The Rule of Law*, (Netherlands: IBFD, 1997),
- Wahyuni, Made Ari., “*Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System*”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 1, No. 1 (2011).
- Westberg, Bjorn., *Cross-Border Taxation of E-Commerce*, (Netherlands: IBFD Publications BV, 2002)

Wibowo, Johana Lanjar., *AEOI Dan Kesiapan Indonesia*, (Juli, 2017).

Widjaja, Gunawan., “Pentingnya Pengaturan Trust dalam Institusi di luar Pasar Modal”, Ed.18, (Jakarta: Buletin Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, 2013)

Wikipedia.org, *Pajak*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>. Diakses tanggal 20 Desember 2019.

D. Kamus

Crumbley, D. Larry., Jack P. Friedman, dan Susan B. Anders, *Dictionary of Tax Terms*,(New York: Barron’s Business Guide, 1994)

Gardner, Bryan A, “*Black’s Law Dictionary*”, 7th ed., (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999)

Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliën R Palandeng, dan Godlieb N Mamahit., *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara,2009).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Simon R James, *A Dictionary of Taxation* (Cheltenham: Edward Elgar Pub., 2 ed, 2012).

Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>. Diakses tanggal 29 Desember 2019.

KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 29 Januari 2020.